



DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SASARAN, TARGET DAN CAPAIAN RPJM

Visi dan Misi

Visi Bupati selaku Kepala Daerah tahun 2017-2022

- **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Iklas”**

Dinas Sosial sangat terkait untuk mewujudkan dan mensukseskan misi ke-3 yaitu **“Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”** dan misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis”**



Tugas

(berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2009)

Melaksanakan kewenangan
Pemerintah Daerah dan tugas
pembantuan di Bidang
Kesejahteraan Sosial



Fungsi

(berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2009)

- Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
- Pembinaan, rehabilitasi dan bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis Dinas
- Penyelenggaraan urusan kesejahteraan dinas



Kewenangan

(berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2009)

- Penetapan kebijakan dan rencana bidang sosial skala kabupaten
- Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan kerjasama Bidang Sosial skala kabupaten
- Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten
- Penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial skala kabupaten
- Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten
- Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di Bidang Sosial
- Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten
- Pendidikan dan pelatihan Bidang Sosial

- Alokasi sumber daya manusia potensial
- Penelitian bidang sosial mencakup wilayah kabupaten
- Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja
- Pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial professional dan fungsional panti sosial swasta
- Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial
- Mendukung pengembangan pelayanan sosial
- Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten
- Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten
- Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten
- Pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten
- Pemberian Izin Pengangkatan Anak antar WNI



Kebijakan Dinas Sosial

- Menciptakan kemampuan masyarakat mengatasi masalah kesejahteraan sosial berdasarkan potensi dan sumber daya kesejahteraan yang ada di lingkungan sosialnya.
- Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang lebih adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak untuk memperoleh pelayanan sosial yang sebaik-baiknya.
- Menciptakan iklim yang dapat mendorong, meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang berbasis pekerjaan sosial baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Mengembangkan nilai-nilai keperintisan, kejuangan dan kepahlawanan serta kesetiakawanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi PMKS terutama Lansia, ODK dan Anak

- Mendorong tumbuhnya Tempat Penitipan Anak di lingkungan industri, perkantoran, pasar baik milik pemerintah daerah dan masyarakat
- Menyediakan Rumah Penampungan Anak Sementara (RPAS) dalam upaya perlindungan sosial
- Menciptakan iklim mencegah terjadinya pekerja anak di bawah umur.
- Mewujudkan pemerataan akses pelayanan sosial bagi ODK.
- Meningkatkan pemberdayaan ODK dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi ODK.
- Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
- Penyaluran jaminan sosial dari pemerintah daerah bagi penerima pelayanan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pendamping pemanfaatan jaminan sosial.
- Penyaluran jaminan sosial dari pemerintah daerah bagi penerima pelayanan dengan melibatkan peran serta organisasi/LKS masyarakat sebagai pengelola jaminan sosial.
- Pengelolaan pelayanan sosial yang berkualitas dan akuntabel.

26 Data PMKS

No	Jenis PMKS
1	FAKIR MISKIN
2	ANAK BALITA TERLANTAR
3	ANAK TERLANTAR
4	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
5	ANAK JALANAN
6	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN
7	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN
8	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS
9	LANJUT USIA (NON POTENSIAL)
10	PENYANDANG DISABILITAS
11	TUNA SUSILA
12	GELANDANGAN
13	PENGEMIS

No	Jenis PMKS
14	PEMULUNG
15	KELOMPOK MINORITAS
16	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)
17	ORANG DENGAN HIV/AIDS
18	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
19	KORBAN TRAFFICKING
20	KORBAN TINDAK KEKERASAN
21	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS)
22	KORBAN BENCANA ALAM
23	KORBAN BENCANA SOSIAL
24	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGI
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.

- ▶ **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).** Adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
- ▶ **Organisasi Sosial.** Adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
- ▶ **Karang Taruna.** Adalah organisasi sosial kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda wilayah daerah, kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan organisasi berdiri sendiri.

- **Wahana Kesejahteraan.** Adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja daripada kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
- **Dunia Usaha yang melakukan UKS.** Adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta kewirasusahaan berserta jaringannya yang dapat melakukan tanggung jawab sosialnya.
- **Keperintisan dan Kepahlawanan.** Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan. Janda/Duda perintis kemerdekaan adalah isteri/suami yang ditinggal(meninggal dunia) oleh perintis kemerdekaan dan telah disahkan sebagai janda, duda perintis kemerdekaan. Keluarga Pahlawan adalah suami/isteri (warakawuri) pahlawan, anak kandung, anak angkat yang diangkat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pahlawan yang bersangkutan belum/tidak berkeluarga maka yang menjadi keluarga adalah orang tuanya.

Indikator Kinerja Dinsos yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk (%)	20	17,00	15,50	14,00	12,50	10,00	10,00

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
2	3	4	5	6
Sarana prasarana yang terbatas dan sampai saat ini belum mempunyai panti rehabilitasi /panti sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial	- Indikator kinerja - SPM Bidang Sosial	Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan rehabilitasi sosial masih terbatas	Terbatasnya Anggaran yang Diperoleh SKPD	Dengan terbatasnya anggaran yang diperoleh SKPD dalam rangka pembangunan, Perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas
Pengelolaan data dan informasi kemiskinan dan PMKS lainnya masih belum terpadu	- Indikator kinerja - SPM Bidang Sosial	Belum tersedianya SDM pengelola data dan informasi serta belum dilakukannya verifikasi dan validasi data	Belum adanya rekrutmen ASN yang melakukan pengelolaan data dan informasi	Dinas sosial belum dapat menyediakan data dan informasi terpadu terkait kemiskinan dan PMKS lainnya.

Lanjutan....

CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Besaran permasalahan PMKS dan PSKS yang semakin kompleks meskipun terjadi penurunan populasi penduduk miskin	- Indikator kinerja - SPM Bidang Sosial	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya sinergisitas lintas sektor dalam penanganan PMKS	Kurang maksimalnya penyediaan aksesibilitas pelayanan rehabilitasi terhadap PMKS dan PSKS
Masih banyak PMKS yang belum mempunyai jaminan sosial dan masih banyak PMKS belum mendapatkan bantuan usaha	- Indikator kinerja - SPM Bidang Sosial	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran , SDM, dan dukungan pelayanan	Penguatan dukungan lintas sektor Verifikasi dan validasi data Terbatasnya anggaran	Kurang maksimalnya aksesibilitas dan pelayanan, bantuan yang diberikan pada sasaran PMKS

CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS		Keterbatasan Daya jangkau dinas Sosial dalam Memberdayakan PSKS	Terbatasnya SDM Kesejahteraan Sosial Terbatasnya anggaran Kurangnya perhatian lintas sektor terkait dalam urusan sosial	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat
Menurunnya Nilai-Nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan		Masih lemahnya perhatian dan pentingnya pengembangan modal sosial dan nilai kesetiakawanan sosial dan penghargaan pada Pahlawan dan Perintis kemerdekaan	Arus era globalisasi dan Berkembangnya Nilai-Nilai Individualis masyarakat	Belum maksimalnya Dinas Sosial Kab dalam mengembangkan nilai kesetiakawanan Sosial Belum dapat dilakukannya kegiatan ziarah wisata

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

- **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
Anggaran tersedia Rp. **400.374.000,00**
- **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
Anggaran Tersedia Rp. **111.425.000,00**
- **Program Pembinaan Anak Terlantar**
Anggaran tersedia Rp. **71.999.800,00**
- **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**
Anggaran tersedia Rp. **63.000.000,00**
- **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Anggaran tersedia Rp. **243.065.800,00**
- **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**
Anggaran tersedia Rp. **436.998.800,00**

RINCIAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) TA. 2019 DARI KEMENTERIAN SOSIAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA BANSOS	BESARAN BANSOS APBN 2019
1	PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	3618 KPM	12.509.500.000
2	PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI	8163 KPM	10.775.160.000
3	BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA(KUBE) PERKOTAAN	80 KUBE/800 KPM	1.600.000.000
4	BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA(KUBE) PESISIR	30 KUBE/200 KPM	600.000.000
5	PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	130 Rumah	1.950.000.000
7	SARANA LINGKUNGAN PERDESAAN	7 Unit	350.000.000
8	STOK BERAS UNTUK KEBENCANAAN	100 TON	350.000.000
		TOTAL	28.134.660.000

Penutup...

Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi kedepan, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan serta dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial (stakeholder) baik Pemerintah, Dunia Usaha dan institusi kemasyarakatan untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan pembangunan kesejahteraan sosial.

7ERIMA KASIH

